

PERAN POLITIK KIAI DALAM PROSES POLITIK DI PARTAI POLITIK (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan)

Ulin Nuha

Abstract

Since the passing of the reform party brings a lot of the principles of Islam as an ideological platform and the foundation of the party. This seems in line with the kiai activities to disseminate the teachings of Islam. Of course the inevitable happened "utilization" in the pesantren kiai leadership by politicians that carries both Islamic and nationalist principles. Practical political developments in Indonesia to bring a number of kiai involved directly or indirectly in the political scene in the country. Using kiai political aspirations of political parties in national and local level in every election. As a result, kiai faced practical political world filled with uncertainty and interests. Variety of tactics and strategies that run political campaigns of political parties usually do not forget the importance of the role of kiai as a "vote getter" in the forefront of collecting votes.

Keyword : The Role of Political, Kiai, Political parties

A. PENDAHULUAN

"Dalam setiap perubahan sosial yang terjadi, sosok kiai selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kiai dengan kehidupan sosial masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kiai telah menjadi kekuatan tersendiri dalam struktur sosial budaya masyarakat, bahkan kiai memegang peran penting dalam mengubah peta kehidupan sosial masyarakatnya. Hal ini terjadi karena kiai telah menjadi elite sosial di tengah-tengah masyarakat yang dalam struktur sosial kultural masyarakat dianggap sebagai raja-raja lokal yang bisa menggerakkan kehidupan masyarakat, sehingga tidak berlebihan apabila kiai diposisikan layaknya raja yang disanjung dan dihormati". (Ibnu Hajar, 2009:17)

"Menurut Endang Turmudi (2003:246) bahwa aspek politik kepemimpinan kiai perlu diperhatikan karena ia mengungkap pola patronase dalam hubungannya dengan masyarakat, dan bagaimana kekuasaannya secara jelas terlihat sentralitas. Otoritas dan kekuasaan kiai dalam masyarakat menimbulkan asumsi bahwa pengaruh kiai tidak terbatas hanya pada hubungan sosial saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang politik. Asumsi ini dibuktikan dengan fakta bahwa selama pemilu, misalnya, partai peserta pemilu coba memanfaatkan kiai untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Pengaruh kiai ini tentu begitu jelas dikalangan umat Islam saleh yang sering mengikuti langkah politik kiai".

Kepemimpinan kharismatik kiai ini sudah umum dikenali masyarakat. Pengaruh kiai yang kuat "dimanfaatkan" atau menjadi incaran para politisi untuk mendulang suara. Berbagai taktik dan strategi kampanye politik yang dijalankan partai politik biasanya tidak melupakan akan arti penting peran kiai sebagai "vote getter" terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi, semenjak bergulirnya reformasi banyak partai mengusung azas Islam sebagai *platform* dan landasan ideologis partai. Hal ini tampak sejalan dengan aktivitas kiai yang menyebar-luaskan ajaran Islam. Tentu tidak dapat dihindari terjadi "pemanfaatan" kepemimpinan kiai di pesantren oleh para politisi baik yang mengusung azas Islam maupun nasionalis (*pragmatism*). Perkembangan politik praktis di Indonesia membawa sejumlah kiai terjun langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Aspirasi politik kiai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal dalam setiap Pemilu. Alhasil, kiai dihadapkan pada dunia politik praktis yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan.

Hampir di setiap partai politik, figur kiai menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dunia politik tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu, bahkan "seakan-akan" telah menjadi sesuatu yang harus direbut dan diraih. Kiai telah mendapatkan

lahan garapan yang baru, setelah sebelumnya lebih banyak mengurus masalah pesantren dan masyarakat secara langsung, kini telah beralih mengurus dunia politik yang secara otomatis telah menyedot energi para kiai.

Keakraban kiai dan politik menampakkan dinamika yang menarik khususnya jika kita memotretnya di era pasca-kemerdekaan. Proses persiapan kemerdekaan NKRI yang secara intens menyertakan peran besar para kiai dilanjutkan di masa setelah kemerdekaan. Para kiai telah mengukir sejarah efektifitas peran politiknya yang membanggakan di kancah politik nasional era Bung Karno. Hal terbukti bahwa kekuatan politik kiai bukan hanya berhasil menjadi kekuatan politik penyeimbang yang memadai atas gempuran golongan komunisme, namun juga eksistensinya terakui dengan dibentuknya kementerian penghubung pesantren dan ulama.

Dalam proses transisi politik dari Bung Karno ke Soeharto tahun 1966, sejarah juga mencatat kontribusi besar kiai-kiai pesantren, khususnya dalam membungkam pengaruh kekuatan politik komunisme yang bergerak sporadis di penghujung kekuasaan Bung Karno. Sayangnya dinamika politik pemerintahan Soeharto secara sistematis melakukan marginalisasi terhadap para kiai. Mereka dipinggirkan karena ketidakpahaman dan ketakutan yang berlebihan pihak penguasa terhadap gerakan politik kiai.

Pupusnya rezim Soeharto memberikan harapan besar bagi seluruh rakyat di republik ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya di segala bidang. Belunggu politik otoriter yang telah terputus diikuti oleh semangat demokrasi yang luar biasa sehingga bermunculan partai-partai politik secara dahsyat. Pada saat yang sama umat Islam mulai kembali berpeluang untuk memainkan peran dalam kancah politik secara signifikan. Termasuk di dalamnya adalah para kiai. Gelombang reformasi telah memancing para kiai untuk "turun gunung" dan turut membidani gerakan politik.

Pasca reformasi, eksistensi keindonesiaan memang menghadapi banyak tantangan serius. Dengan modal sejarah yang gemilang dalam memperjuangkan kemerdekaan, pesantren mestinya bisa berbuat banyak untuk turut membantu penyelesaian berbagai masalah kebangsaan. Sayangnya, para pemimpin pesantren yang belakangan marak terlibat dalam politik praktis tidak banyak yang memiliki visi kebangsaan seperti para pendahulu mereka. Kita berharap, pesantren melalui para kiai, santri dan alumninya di masa-masa mendatang dapat memainkan lagi peran kebangsaan seperti yang dilakukan oleh para pendahulu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran politik KH. A. Haris Shodaqoh dalam proses politik di partai politik Partai Persatuan Pembangunan.

"Dewasa ini, para kiai sepertinya saling berlomba terjun ke politik praktis melalui partai politik yang beragam (multi partai), baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kiai tidak berkumpul dalam satu wadah partai politik tertentu, tetapi menyemut ke dalam berbagai partai politik, terutama partai-partai politik yang berlatar belakang dengan simbol-simbol ke-kiai-an (PKB, PPP, PNU, PKNU, dan lain sebagainya)". (Ibnu Hajar 2009:103)

"Peran (role) menurut H. Achmad Patoni (2007:46) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan terhadap hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara peran dengan kedudukan. Perbedaan antara keduanya dilakukan untuk kepentingan ilmu. Karena memang sebenarnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan dan satu tergantung pada yang lain. Begitu sebaliknya. Tidak peran yang tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran".

"Menurut Ibnu Hajar (2009:40) peran kiai dapat diterjemahkan ke dalam beberapa hal. Pertama, menyebarkan dan mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sebagaimana

diketahui bersama, pesantren merupakan salah satu pusat penyebaran ajaran dan nilai Islam. Kedua, melakukan kontrol dalam masyarakat. Kontrol kiai dapat berupa sebuah usaha penyadaran terhadap segala perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai Islam. Ketiga, membentuk memecahkan persoalan kemasyarakatan. Fungsi ini kerap kali muncul dominan, dimana kiai sebagai problem solver bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, yang kadangkala tidak hanya mencakup pada keagamaan, tetapi juga persoalan bercocok tanam, rumah tangga, dan lain sebagainya. Keempat, menjadi agen perubahan sosial (agent of social movement). Secara garis besar, tiga peran diatas mengalir dalam sebuah arus besar perubahan sosial. Tentunya, perubahan yang dimaksud ialah perubahan pada yang lebih baik dalam segala dimensi kehidupan, terutama corak keberagamaan”.

Kata kiai dalam konteks tulisan ini adalah orang yang memiliki keahlian dalam agama Islam, yang mengajar santri di pondok Pesantren. Pesantren sebagai lembaga Islam tradisional tertua di Indonesia telah melakukan transformasi. Perubahan telah menyentuh institusi ini. Pesantren yang pada dasarnya merupakan subkultur dalam kehidupan setelah masyarakat, telah bergeser perannya tidak sekedar lembaga yang mencetak kiai atau ulama dan intelektual muslim yang diharapkan dapat melanjutkan cita-cita para pendahulunya untuk memajukan umat Islam secara keseluruhan. dalih demi kemaslahatan ummat.

Terkait penjelasan diatas, peneliti melihat dan memperhatikan salah satu kiai yang cukup dikenal di Semarang bahkan Jawa Tengah adalah KH. Ahmad Haris Shodaqoh pengasuh Pondok Pesantren Tafsir Dan Sunnah Al-Itqon Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang. Beliau pernah diberi posisi sebagai ketua Majelis Pertimbangan Wilayah tahun 2010, saat ini K. Haris aktif sebagai Wakil ketua MPW (Majelis Pakar Wilayah), ketua MSW (Majelis Syari'ah Wilayah) DPW PPP Jawa Tengah dan tercatat sebagai anggota Majelis Syariah Pusat DPP sampai sekarang.

Dalam organisasi non parpol, K. Haris sebagai pengurus Mutasyar NU Jawa Tengah, dan Ketua I (membidangi Fatwa) di MUI Jawa Tengah tahun 2012 sampai sekarang. Yang lebih mengagumkan lagi, di bawah asuhan langsung KH. Ahmad Haris Shodaqoh memiliki Majlis Ta'lim Ahad Pagi yang mengkaji Tafsir Al-Ibriz dengan peserta kurang lebih 12000 orang dari berbagai kalangan dan dari dalam kota ataupun luar kota Semarang.

Disamping itu juga, dengan memperhatikan hasil pemilu legislatif 2009 yang lalu, PPP di kota Semarang hanya mendapatkan jatah 1 kursi dari 50 kursi DPRD Kota Semarang yang diperebutkan, dan ironisnya khusus di Daerah Pemilihan 3 (Pedurungan, Gayamsari dan Genuk) Kota Semarang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mendapatkan jatah satupun kursi di Dewan, padahal Kecamatan Pedurungan dimana dia tinggal berikut pondok pesantrennya, ini mengapa bisa terjadi ?

Dari hal diatas, maka timbul pertanyaan bahwa, bagaimana peran politik KH. A. Haris Shodaqoh di PPP dalam proses politik di parpol Partai Persatuan Pembangunan, yang mana dia termasuk salah satu tokoh kharismatik dan cukup berpengaruh di Jawa Tengah, yang dengan peran dia sebagai “*vote getter*” di parpol PPP diharapkan dapat meraup suara pemilih secara signifikan.

A.1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini, memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Desain Kasus dalam penulisan ini adalah tunggal, yaitu studi kasus peran KH. A. Haris Shodaqoh sebagai subjek utama dan sekaligus sebagai informan kuncinya yang dilengkapi dengan informan tambahan yaitu santri Pondok

Pesantren Tafsir Dan Sunnah Al-Itqon Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang, beberapa elit atau pengurus papol PPP dan tokoh masyarakat Jawa Tengah serta warga masyarakat sekitar ponpes diluar pengurus PPP, yang diperlukan untuk menunjang kesempurnaan tulisan ini dan dianggap cukup. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi, wawancara dan observasi langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa Analisa data studi kasus, membatasi studi pada kekhususan konteks dengan karakteristik dan keterbatasannya (wilayah). Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal (kasusnya hanya satu) dengan pendekatan holistik.

A.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik KH. Haris Shodaqoh dalam proses politik di parpol PPP saat ini, dari hasil penelitian dilapangan bahwa pada prinsipnya hanya satu hal yaitu, dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dengan memberikan pesan moral, nasihat (*tausiyah*) kepada para pengurus harian partai PPP dan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan peneliti menyimpulkan bahwa, ada tiga peran politik yang cukup penting yaitu, peran dalam proses pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik dan rekrutmen politik.

B. PEMBAHASAN

B.1. Gambaran Umum

Pondok Pesantren Tafsir dan Sunnah Al- Itqon yang berada di desa Bugen kelurahan Tlogosari Wetan adalah salah satu pondok pesantren yang ada Pedurungan Semarang. Perlu diketahui bahwa, sejarah keberadaan Pondok Pesantren ini sangat terkait erat dengan sejarah desa Bugen. Sosok sederhana dan kharismatik, beliau adalah Ahmad Haris Shodaqoh yang lahir 59 tahun yang lalu di desa Bugen Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang.

Tahun 2010 sebagai seorang kiai sekaligus politisi, K. Haris sebetulnya ingin istirahat dari dunia politik praktis, karena ingin berkonsentrasi penuh di pondok pesantren yang dia asuh. Ternyata banyak elit politik PPP termasuk para kiai dari Kota/Kabupaten, Jawa Tengah bahkan pusat berharap besar bahwa KH. Haris Shodaqoh harus tetap eksis di PPP sebagai orang tua (kiai). Karena tidak bisa menolak, dia pernah diberi posisi sebagai ketua Majelis Pertimbangan Wilayah tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 menjadi wakil ketua Majelis Pakar Wilayah sampai sekarang. Tidak sampai disitu, tahun ini DPW PPP Jawa Tengah sedang mengusulkan KH. Haris Shodaqoh kepada DPP PPP untuk menjadi ketua Majelis Syariah Wilayah DPW PPP Jawa Tengah, dan bahkan dia masih tercantum sebagai anggota Majelis Syariah Pusat DPP PPP.

Dari uraian profil dan karir politik K. Haris diatas menunjukkan bahwa, informan adalah sosok yang cukup dikenal dan berpengaruh di mata santri dan masyarakat serta di parpol PPP khususnya di Jawa Tengah. Karena dengan seabreg pengalaman yang dia miliki sudah semestinya peran politik dia di PPP cukup signifikan dan dibutuhkan demi pengembangan partai pada saat ini dan akan datang.

B.2. Peran Politik KH. A. Haris Shodaqoh Dalam Proses Politik di Parpol PPP

Peran yang sudah dilakukan oleh K. Haris dalam melakukan peran politiknya di partai politik PPP yang dimulai dari tahun 2006, ketika beliau sebagai ketua

Majelis Pertimbangan Wilayah, wakil ketua Majelis Pakar Wilayah tahun 2011 dan terakhir sebagai ketua Majelis Syariah Wilayah DPW PPP sampai sekarang.

Orientasi para kiai dalam terjun ke dunia politik adalah untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* ini diletakan dalam pengertian yang luas, yaitu pengawasan dan evaluasi. Dalam pandangan kiai, konsep ini memiliki peran signifikan, karena dalam kenyataannya tatanan sosial-politik yang ada banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Karena itulah para kiai merasa perlu untuk terjun ke dalam dunia politik untuk mewujudkan kontrol kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan moral, hukum, maupun aturan agama.

Selain itu, konsep *amar ma'ruf* ini hendaknya juga dipahami dalam cakupan dan pengertian yang luas, yaitu mewujudkan perbaikan sistem pendidikan, penegakan supremasi hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memprioritaskan pembangunan bagi rakyat. Meskipun demikian, masuknya para kiai ke dunia politik tidak selalu membawa implikasi yang menggembirakan. Misalnya pesantren yang tak terurus dengan baik, ataupun fungsi-fungsi sosial-keagamaan kiai yang sedikit banyak terdegradasi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh K. Haris, yang mengatakan bahwa sudah tidak tabu lagi kiai atau ulama terjun dalam dunia politik sepanjang dalam konteks politik kebangsaan dan kerakyatan secara luas dan kemaslahatan umat, bukan politik kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. Peran kiai dan ulama akan lebih besar jika mereka masuk di dalamnya. Kiai dan ulama dapat melakukan peran sebagai pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.

Senada dengan pendapat DR. KH. Ahmad Darodji, M.Si., (Ketua MUI Provinsi Jawa Tengah), saat wawancara di kantornya, beliau mengatakan bahwa tidak ada masalah kiai masuk di politik praktis, sebab dengan adanya kiai paling tidak aktifitas kepartaian terkontrol dari pesan moral kiai yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah kemungkaran. Di dalam masyarakat Islam, kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsatul al-anbiya*). Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kiai, khususnya dalam aspek kehidupan politik di Indonesia, termasuk dalam proses politik itu sendiri.

Pro-kontra seputar peran Kiai dalam dunia politik praktis masih menjadi perbincangan dalam masyarakat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Kiai, seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat saja, terutama dalam kehidupan beragam. Oleh karena itu, lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik. Adapula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan bagi Kiai meninggalkan politik praktis sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri.

Dari persoalan tersebut sebenarnya ada sebagian masyarakat yang mengharapkan posisi dan peran kiai berdiri independen tidak ikut dalam kegiatan politik praktis, tidak terkontaminasi oleh hingar bingar dan panasnya perpolitikan. Kehadiran kiai ini diharapkan akan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta dapat mendinginkan panasnya arus politik dan menjadi *moral force* dalam kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Disisi lain ada pula sebagian masyarakat yang mengharapkan peran kiai atau elit agama berperan

lebih signifikan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan dan krisis yang terjadi di Indonesia.

Maka dalam hal ini pandangan KH. Dzikron Abdullah, (pengasuh Pondok Pesantren Ad- Dainuriyah 2 Gemah Semarang, dan ketua Thoriqoh Qodiriyah An-Naqsabandiyah Jawa Tengah) tentang pandangan terhadap K. Haris yang aktif di parpol PPP Jateng, bahwa sebaiknya posisi kiai netral saja dalam di dunia politik, agar bisa diterima disemua kalangan. Kalaupun toh kiai harus terlibat langsung di dunia politik, itu ada penilaian positif dan negatifnya. Segi Positif, kiai bisa mengayomi dan memberi sentuhan spiritual dan etika moral terhadap pengurus dan kader. Tapi dari segi negatif, ada kesan dimiliki oleh satu kelompok tertentu dan tidak bisa diterima di semua kalangan serta dijumpai ada istilah lawan bisa menjadi kawan dan sebaliknya. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi Rahmat bagi seluruh alam, sebab kiai (ulama) adalah pewaris para nabi.

Berbeda dengan pendapat KH. Ubaidullah Shodaqoh, SH., (ketua Yayasan Al- Wathoniyah Pedurungan Semarang dan Katib I DPW NU Provinsi Jawa Tengah), adik kandung K. Haris. Beliau mengatakan bahwa kiai terjun ke dunia politik praktis karena kiai terjun ke dunia politik, termasuk Mas K. Haris itu karena ada "keterpaksaan", dengan pertimbangan hukum dan norma-norma yang harus disampaikan di partai politik. Sebab kalau didalamnya tanpa ada kiai, jalannya proses politik parpol PPP khususnya dikhawatirkan akan melenceng dari ideologi nilai-nilai Islam itu sendiri.

Berbeda pula dengan pandangan Drs. Muhammad Adnan, MA., (Ketua DPW NU Provinsi Jawa Tengah), ketika ditemui bahwa kiai masuk di partai politik itu ada dua bentuk. Pertama, mewajibkan kiai masuk partai politik itu harus memahami dan mengikuti langsung karakter partai dan fungsinya. Kedua, dipartai politik itu sebetulnya bukan wilayah kiai untuk menyampaikan aspirasinya.

Adapun peran politik KH. Haris Shodaqoh dalam proses politik di parpol PPP saat ini, dari hasil penelitian dilapangan bahwa pada prinsipnya hanya satu hal yaitu, dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dengan memberikan pesan moral, nasihat (*tausiyah*) kepada para pengurus harian partai PPP dan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Peran K. Haris diatas terbukti ketika pada hari Sabtu, 17 oktober 2009, bertempat di Pondok Pesantren Al Itqon Gugen Semarang, tujuh anggota FPPP DPRD Jawa Tengah diwejang oleh para Ulama PPP Jawa Tengah. Lebih dari 10 Ulama memberikan tausiyah kepada anggota FPPP KH. Haris Shodaqoh, Pengasuh Pesantren Al-Itqon sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jawa Tengah mengatakan bahwa anggota dewan tidak hanya membawa amanat rakyat tetapi juga membawa amanat Allah SWT oleh karena itu setiap hal yang dilakukan oleh anggota akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Ada empat sifat yang harus selalu tertanam dalam hati anggota FPPP; pertama Sifat siddiq (Jujur); Jangan pernah membohongi masyarakat apalagi menganggap enteng hukum Allah, kedua Amanah (dapat dipercaya); sebagai anggota FPPP hendaknya bisa dipercaya, dan memberi contoh yang baik; jelasnya. Ketiga; Tabligh (Menyampaikan); Salah satu tugas anggota dewan adalah menyampaikan amanah rakyat; jangan hanya duduk, diam; Katakan yang benar itu benar dan yang salah tetap salah walaupun itu pahit adanya. Keempat adalah Fatonah (Cerdas); Sebagai anggota dewan harus cerdas membaca situasi lingkungan sekitar, cerdas mensikapi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat dan peduli terhadap kepentingan sesama tutur Kiai Haris. Yang tak kalah penting lanjut ulama kharismatik ini adalah anggota FPPP adalah satu kesatuan

yang utuh; maka kebersamaan, kekompakan dan komitmen anggota FPPP harus tetap dijaga, ketika sudah tidak ada lagi kebersamaan dan komitmen maka tunggulah kutukan dari Allah SWT, tegasnya.

Selanjutnya dalam perannya di PPP, K. Haris pada posisi struktural partai pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan dan wakil ketua Dewan Pakar Wilayah, serta jabatan paling baru adalah sebagai ketua Syariah Wilayah PPP Jawa Tengah, tugas dan perannya ikut serta dalam pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik dan rekrutmen politik itu adalah memberikan saran, *tausiyah* (pesan moral) yang sesuai dengan syariah (*fiqih*) kepada pengurus harian partai, kader partai yang menjadi anggota DPRD, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota serta kepada masyarakat luas.

Hal tersebut seperti yang disampaikan K. Haris, peran kami di parpol PPP sesuai dengan tugas kepartaian sesuai dengan AD/ART, karena saya pernah menjadi Dewan Pertimbangan Wilayah, ya saya hanya memberikan pertimbangan, nasihat serta saran kepada pengurus Harian DPW, dan juga pernah menjadi Dewan Pakar Wilayah tugasnya mengkaji masalah bangsa, negara dan masyarakat kepada pengurus Harian. Dan sekarang ini saya ditunjuk sebagai ketua Dewan Syariah Wilayah Jawa Tengah, secara umum tugasnya memberikan nasihat, arahan, *tausiyah* (pesan moral) berdasarkan agama kepada Pengurus Harian partai dan kader yang menjadi anggota DPRD, agar dalam melaksanakan tugasnya bisa amanah. Karena mereka tidak sempat ngaji alasannya sibuk dengan pekerjaannya. Harapan kami semua yang saya sampaikan itu bisa diimplementasikan, baik itu di kantor maupun dilapangan sekalipun. Tapi nasihat, saran dan lain sebagainya itu dilaksanakan atau tidak, monggo.

Seperti apa yang telah dilakukan K. Haris dalam perannya di parpol PPP tersebut diatas, sehingga peneliti mengkategorikan peran politik dia dalam tiga hal yang cukup penting untuk dianalisis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peran dalam Pengambilan Kebijakan Partai

Dalam hal pengambilan kebijakan partai, PPP selalu menggunakan sumber ajaran Islam sebagai dasar utama pengambilan keputusan partai. Biasanya sebelum KH. Haris Shodaqoh mengambil keputusan partai bersama anggota yang lain, draft yang terkait kebijakan dan peraturan perundang-undangan itu disampaikan terlebih dahulu untuk dipelajari.

Hal ini disampaikan K. Haris Shodaqoh, dalam wawancaranya yang ditemui penulis dikediamannya tentang pengambilan kebijakan partai, di PPP, Kiai selalu diberi draft sebelum kebijakan itu diputuskan oleh partai. Hal yang krusial Kiai memberikan fatwa dan saran. Misalnya, ada draft tentang UU perkawinan, dimana ada pasangan pria-wanita yang belum diikat dengan akad nikah secara sah menurut agama, hubungan kedua orang itu dianggap zina kalau antara kedua pelaku (pria dan wanita) itu tidak saling setuju atas pebuatannya. Akan tetapi kalau keduanya setuju atas perbuatannya, hal itu tidak dianggap zina. Hal ini bagi PPP jelas-jelas menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Yang seperti inilah tugas kami sebagai Majelis Syariah Wilayah DPW PPP Jateng.

Hal ini juga disampaikan oleh Drs. H. Istajib AS (Ketua Fraksi PPP Jawa Tengah), sesuai dengan tugas K. Haris di struktural parpol PPP DPW Jawa Tengah yaitu memberi fatwa dan masukan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam memberi fatwa tersebut, bisa dengan rapat

insidental dikantor DPW atau fraksi PPP DPRD Jateng, atau dengan cara informal, yaitu kami sowan ke dalemnya bersama pengurus harian dan anggota DPRD Jateng.

2. Peran dalam Sosialisasi Politik

Metode sosialisasi politik salah satunya yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses yang dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, symbol, norma termasuk melalui kegiatan kursus, diskusi, pengajian, halaqoh dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, di parpol PPP khususnya yang dilakukan oleh KH. Haris Shodaqoh adalah sebagai berikut, dari petikan wawancaranya, "Proses politik - misi kiai berpolitik adalah dengan politik kerakyatan bukan parsial. Saat ngaji ya ngaji. Tetapi ketika ada diskusi, pertemuan, khusus kelompok PPP ada pengajian, konfrensi cabang yang diadakan tiap 5 tahun sekali, termasuk Muskerwil. Disamping memberi ceramah agama (pengajian), disitulah kami juga bersosialisasi dengan menyampaikan prinsip perjuangan dan program-program kepartaian".

Hal ini juga disampaikan Drs. H. Istajib AS, (wakil ketua Pengurus Harian Wilayah DPW PPP Jawa Tengah masa bakti 2011-2016) adalah pada saat ada Muskerwil, K. Haris dalam posisinya memberikan pembekalan kepada kader berupa nasehat atau fatwa. Isi dari nasihat itu biasanya pada wilayah ajakan agar semua kader berjalan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan juga memberikan pendidikan keteladanan tingkah laku kepada masyarakat.

Halaqoh ulama PPP Jateng merekomendasikan perlunya peningkatan kedewasaan umat Islam dalam berpolitik, sehingga bisa mencerminkan perilaku politik yang terpuji di mata masyarakat dan Tuhan. Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PPP Jateng KH Haris Shodaqoh menyatakan hal itu, Senin (6/8). "Para ulama harus mampu memberikan bimbingan kepada para politikus Islam agar berpolitik dengan memegang teguh prinsip-prinsip amanah dan berakhlakul karimah," katanya menyampaikan hasil kegiatan yang berlangsung di Wonosobo pekan lalu. Halaqoh DPW PPP yang mengangkat tema "PPP Rumah Kita, Nyaman untuk Beribadah dan Tenram untuk Bersiyasah" diikuti 420 ulama dan habaib itu secara khusus menyoroti kinerja politikus yang berbasiskan agama Islam di panggung politik nasional yang tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Dia mengingatkan, partai Islam, lebih-lebih PPP agar berpolitik dengan memegang prinsip yang terpuji sehingga kepercayaan rakyat dan konstituen tidak luntur. Menyikapi sorotan publik yang minus pada politikus, Kiai Shodaqoh menyarankan perlu pendekatan kasih sayang untuk selanjutnya diwujudkan dalam kehidupan politik secara nyata.

Keteladanan individu dalam sosialisasi politik ini ternyata masih efektif yang terjadi pada figur K. Haris dalam kesehariannya. Walaupun responnya tidak terlalu signifikan dalam pilihan politik santri atau masyarakat. Berkaitan antara keteladanan pribadi beliau ada beberapa catatan penting tentang respon ini, yaitu:

- a. Para pemilih membuat keputusan diakhir sosialisasi atau mengubah pendapat mereka selama sosialisasi mempunyai kemungkinan lebih besar dipengaruhi oleh keteladanan pribadi kiai.
- b. Para pemilih secara psikologis melihat sejarah perjuangan orang tua kita dulu yaitu KH. Shodaqoh Hasan, ayah dari K. Haris yang pernah berjuang atau terjun di partai politik yaitu PPP. Hal ini ada kesan bahwa K. Haris sebagai penerus estafet ayahnya.

3. Peran dalam Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan suatu proses politik yang biasanya mengantarkan seseorang untuk menuju jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik ini sifatnya terbatas. Karena itu, rekrutmen politik sering sering dikenal sebagai proses elitis daripada proses populis.

Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dalam hal proses politik, termasuk peran dan keterlibatan kiai pada pilpres, pemilukada dan pileg dalam konteks rekrutmen politik di sebuah partai politik khususnya PPP.

Ketika peneliti menemui Dr. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si (Ketua DPW PPP Prov. Jawa Tengah), ia menjelaskan, bahwa K. Haris selalu diminta pendapatnya tentang calon-calon yang akan diusung oleh PPP dalam pilpres, pemilukada dan pileg. K. Haris selalu menekankan calon-calon yang santun, berakhlak mulia dan selalu mengedepankan nilai-nilai Islam. Walaupun keputusan terakhir ditangan pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya.

Bagi partai PPP, kaderisasi adalah salah satu aktivitas utama yang menandakan keberlanjutan kehidupan partai. Kaderisasi merupakan salah satu media rekrutmen, pemantapan komitmen dan ideologi politik, pengembangan kapasitas personal dan penguatan kelembagaan partai yang berorientasi jangka panjang. Tanpa kaderisasi, partai bagaikan organisme yang sulit untuk bernafas apalagi untuk memproduksi.

Ini jelas bahwa peran K. Haris dalam proses politik di PPP, khusus pada rekrutmen politiknya masih cukup kental. Cuma masalahnya adalah dilakukan atau tidak, ini tergantung mereka.

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Tidak tabu lagi ada sejumlah kiai yang terjun ke dunia politik praktis, guna melaksanakan peran dan misi diatas, termasuk salah satunya KH. A. Haris Shodaqoh di parpol PPP hingga saat ini. Sehingga dari hasil penelitian yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peran politik KH. Haris Shodaqoh dalam proses politik di parpol PPP saat ini, dari hasil penelitian dilapangan bahwa pada prinsipnya hanya satu hal yaitu, dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dengan memberikan pesan moral, nasihat (*tausiyah*) kepada para pengurus harian partai PPP dan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan peneliti menyimpulkan bahwa, ada tiga peran politik yang cukup penting

yaitu, peran dalam proses pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik dan rekruitmen politik.

- b. KH. Haris Shodaqoh Dalam Pandangan Santri, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat, secara umum hampir sama, yaitu bahwa beliau adalah sosok kiai yang sabar, santun, tawadlu dengan siapa saja, serta pakaian dan penampilannya yang sederhana. Tapi secara struktural kepartaian sebagian kecil ada yang tidak sependapat dengan beliau. Itu dikarenakan perbedaan dalam melihat problem partai dari berbagai sudut pandang dan paradigma oleh pengurus atau kader partai PPP, walaupun nilai dan sikap paternalistik masih tampak dalam keseharian dan hubungannya. Partai politik yang berbasiskan Islam tidak bisa hanya mengandalkan figur kiai sebagai upaya mendongkrak perolehan suara dalam pemilu. Sebab, saat ini figur kiai dan ulama sudah tidak bisa lagi menjadi penarik suara pemilih. Sehingga posisi kiai tidak bisa menjadi *vote getter* lagi.

C.2. Saran

Peran politik kiai dalam proses politik di partai politik, sebaiknya parpol lebih banyak menerima dan terbuka bagi para kiai, baik kiai yang terjun langsung secara praktis maupun hanya partisipan saja, selama peran kiai itu dalam bentuk masukan, saran, dan pesan moral (*tausiyah*) yang dilandasi dengan nilai-nilai Islami. Dengan harapan parpol dan anggota dewannya mempunyai etika politik yang santun yang berimplikasi pada kebijakan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* Yogyakarta LKiS, 2003.
H. Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengah Pusaran Politik*, IRCiSoD, Februari 2009.
Lexi J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2007.
Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Gramedia, Jakarta, 1989.
Robert K. Yin, *STUDI KASUS (Desain Dan Metode)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Tabloid Kaki Langit, *Pondok Pesantren Langitan Tuban*, edisi 07, 2005.

Internet:

<http://blog.persimpangan.com/blog/2007/08/06/pengertian-politik-politics>, Agustus, 2007.

<http://www.suamerdeka.com/harian/0708/07/nas23.htm>

wawancara :

- Wawancara dengan DR. KH. Ahmad Darodji, M.Si., tanggal 2 Juni 2012.
Wawancara dengan Dr.H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si., tanggal 18 April 2012.
Wawancara dengan Drs. H. Istajib AS, tanggal 18 Mei 2012.
Wawancara dengan Drs. Muhammad Adnan, MA., tanggal 16 Mei 2012.
Wawancara dengan KH. Dzikron Abdullah, tanggal 18 April 2012
Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, tanggal 14 dan 18 April 2012
Wawancara dengan KH. Ubaidullah Shodaqoh, SH., tanggal 6 Mei 2012.